

# REFERENSI

**Arah Kebijakan  
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat  
Dalam RAPBN 2019**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

# KEBIJAKAN DAN ANGGARAN

## BELANJA PEMERINTAH PUSAT RAPBN TAHUN 2019

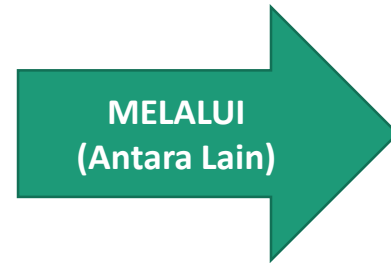


# **KEBIJAKAN DAN ANGGARAN MENURUT FUNGSI**



# FUNGSI PELAYANAN UMUM

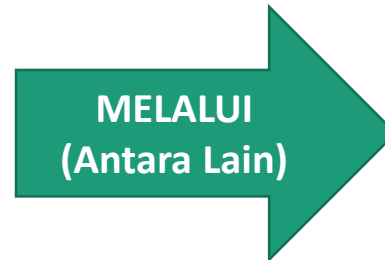
Rp531,6 Triliun





# FUNGSI PERTAHANAN

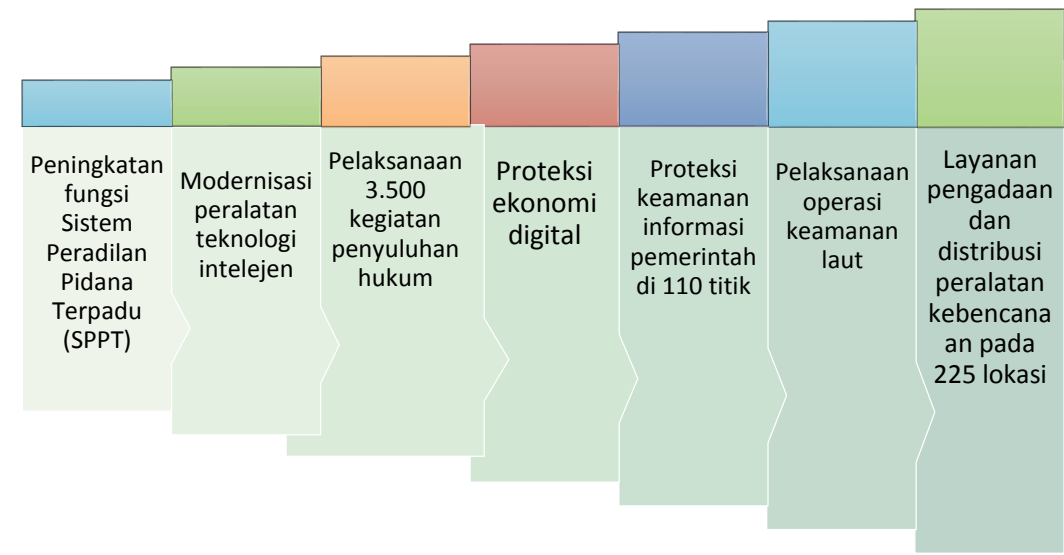
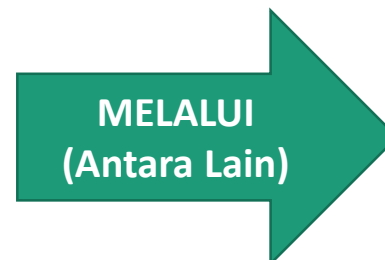
Rp107,2 Triliun





## FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Rp118,5 Triliun





## FUNGSI EKONOMI

Rp389,3 Triliun



MELALUI  
(Antara Lain)

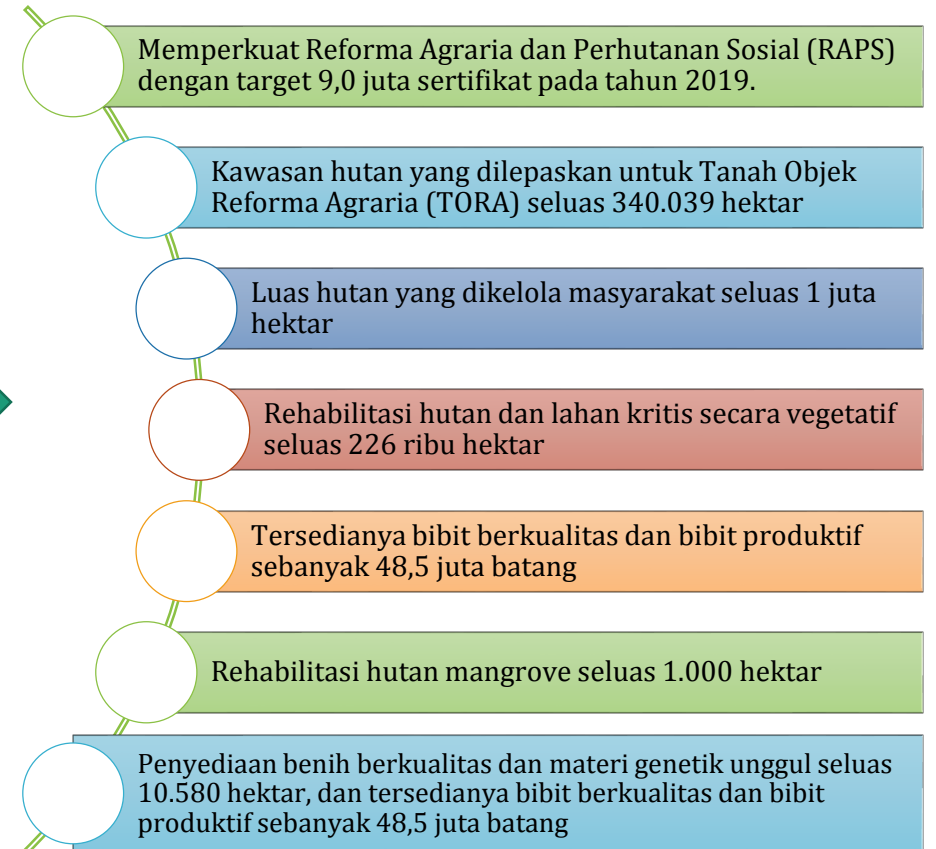
- Pembangunan jalur kereta api sepanjang 415 km'sp dan jalan baru sepanjang 687 km
- Pembangunan 48 bendungan baru dan 114 unit embung baru
- Pembangunan dan rehabilitasi 27.067 m jembatan baru
- Pembangunan 9 lokasi pelabuhan laut dan terselenggaranya angkutan laut perintis sebanyak 113 trayek
- Pembangunan 4 bandara baru
- Pembangunan 42.000 ha irigasi dan rehabilitasi 120.000 ha jaringan irigasi
- 57 kabupaten/kota terhubung backbone fiber optic palapa ring, 1400 lokasi akses internet, dan 5000 desa broadband terpadu.





## FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Rp17,8 Triliun







## FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Rp33,1 Triliun

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak

Meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

**Arah Kebijakan**

Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak

Menjamin ketahanan air

**MELALUI  
(Antara Lain)**

Pemberian bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan untuk 312 unit rumah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman seluas 2.043,0 ha

Pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk 167.680 kk

Pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 25 ha

Pembinaan dan pengembangan system penanganan persampahan untuk 215.500 kk

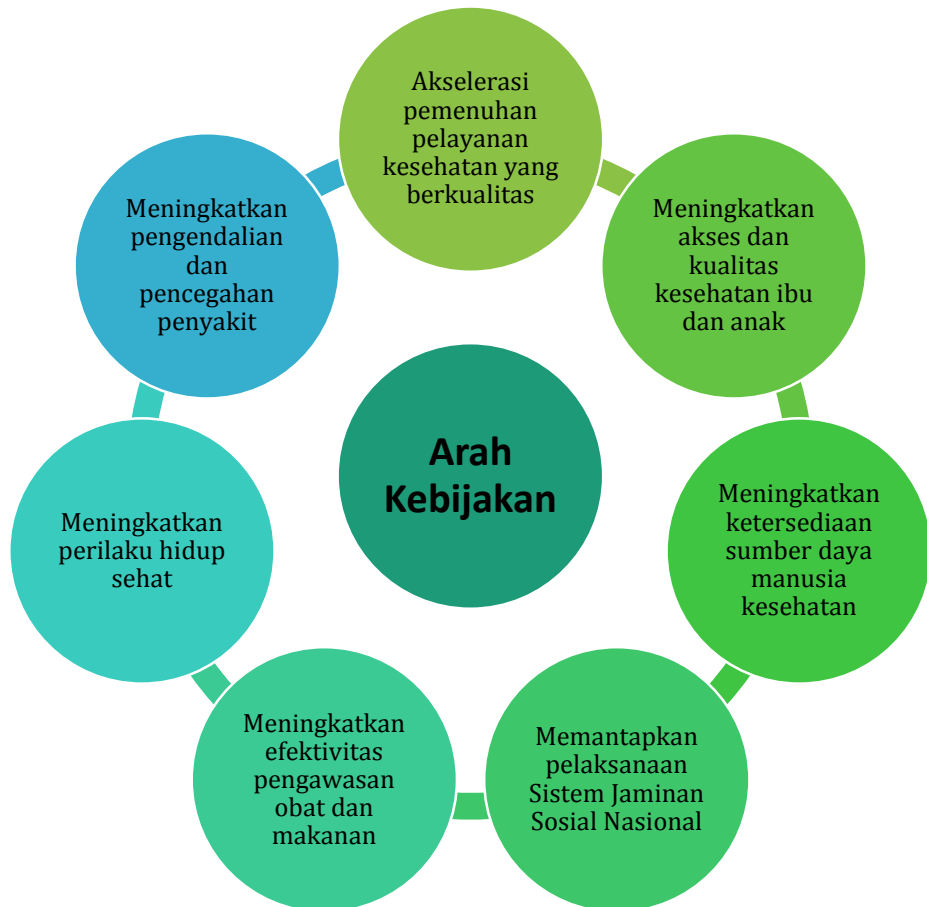
Pembinaan dan pengembangan system penyediaan air minum di 3.424 liter/detik

Pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 8.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 192.000 unit.

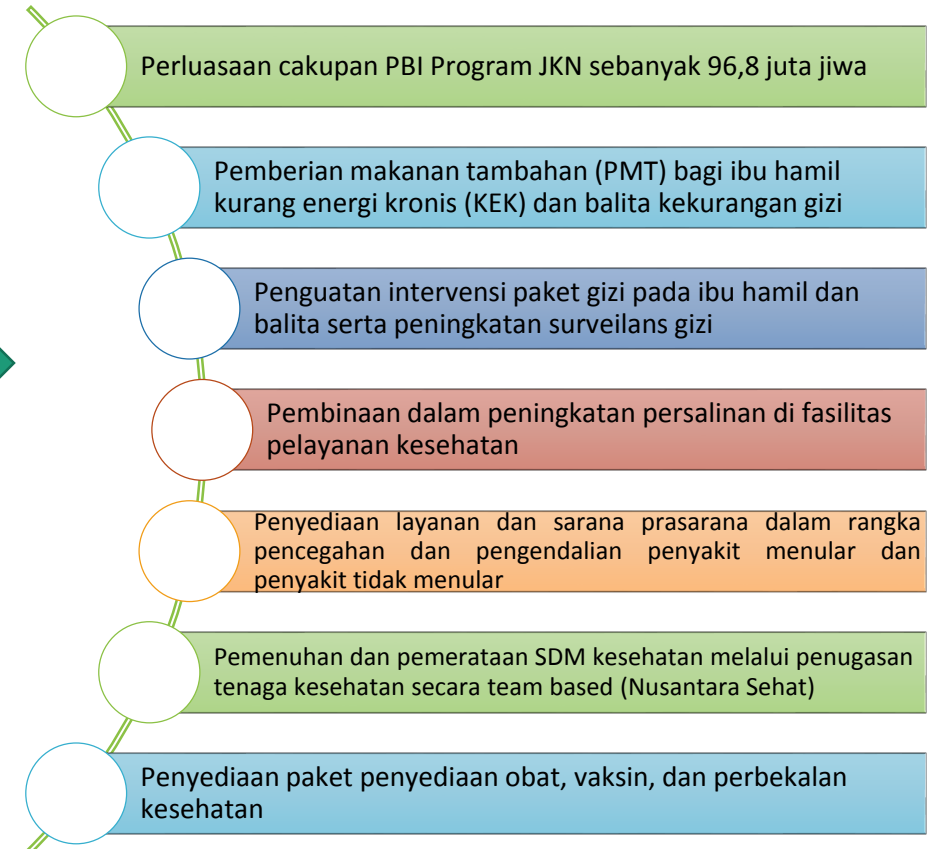


## FUNGSI KESEHATAN

Rp62,7 Triliun



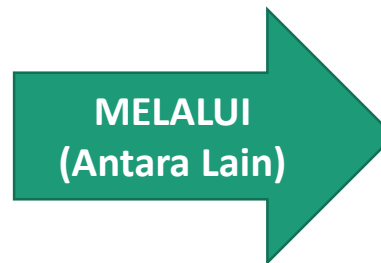
MELALUI  
(Antara Lain)





## FUNGSI PARIWISATA

Rp4,2 Triliun

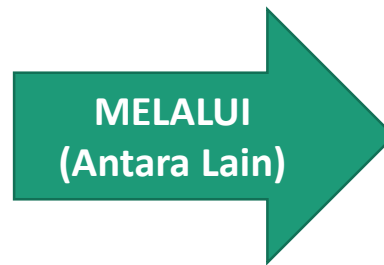
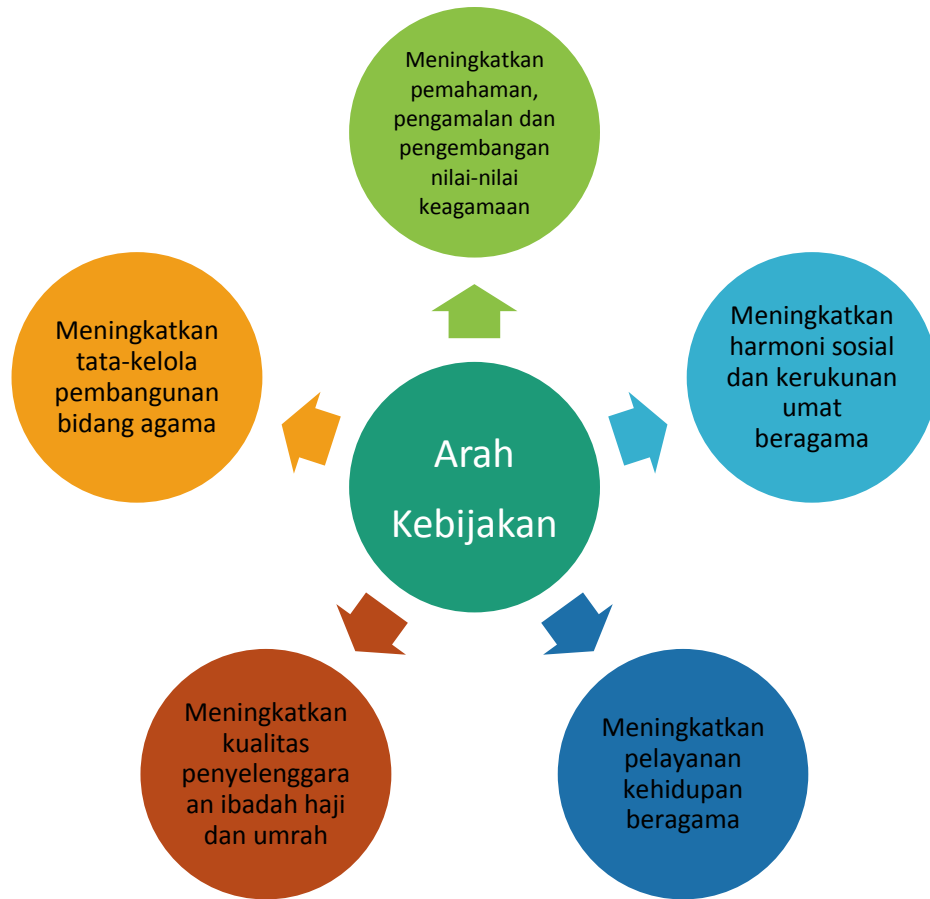


# Arah Kebijakan Belanja Menurut Fungsi



## FUNGSI AGAMA

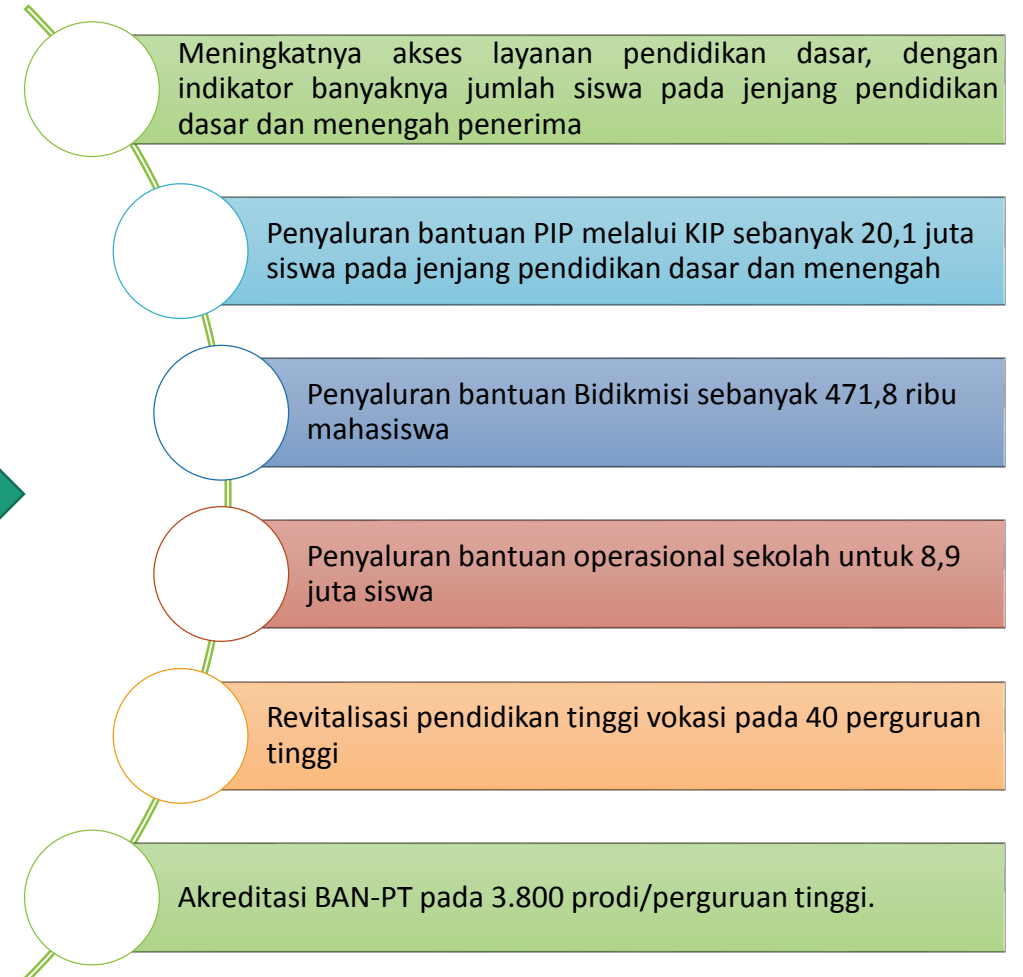
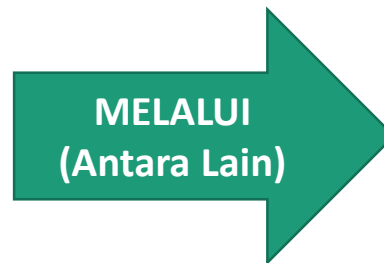
Rp10,1 Triliun





## FUNGSI PENDIDIKAN

Rp146,6 Triliun





## FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

Rp185,9 Triliun

### Arah Kebijakan

Penguatan program-program perlindungan sosial melalui perbaikan dan pengintegrasian pendataan, pemutakhiran, validasi	Penggunaan basis data tunggal penduduk miskin serta Penajaman kebijakan melalui sinergi antar program perlindungan sosial	Penajaman kebijakan melalui sinergi antar program perlindungan sosial (PKH, bantuan sosial pangan, dan subsidi)	Pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran
---	---	---	---

MELALUI  
(Antara Lain)

Penyaluran bantuan tunai bersyarat/PKH kepada 10 juta KPM dengan kenaikan besaran bantuan sebesar 100 persen (conditionalities)

Penyaluran bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM

Penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) bagi 101.800 KK

Rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak balita/anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebanyak 90.000 anak.

Pemutakhiran dan penggunaan basis data tunggal penduduk miskin disertai penyederhanaan mekanisme penyaluran

Meningkatkan akses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan

**KEBIJAKAN DAN ANGGARAN  
MENURUT KEMENTERIAN /  
LEMBAGA**



# Bidang Infrastruktur

Fokus dan arah kebijakan pemerintah pada bidang infrastuktur adalah penyelesaian infrastruktur konektivitas dan peningkatan kapasitas produksi serta pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Rp110,7 Triliun



- ❖ Konektivitas jalan nasional sepanjang 687 Km
- ❖ Pembangunan dan rehabilitasi Jembatan sepanjang 27.067 m



- ❖ Pembangunan SPAM 3.424 liter/detik
- ❖ Penanganan kawasan pemukiman kumuh sebanyak 2.043 ha
- ❖ Pengelolaan air limbah 167.680 KK



- ❖ Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 162.000 ha
- ❖ Bendungan sebanyak 48 bendungan (40 lanjutan dan 8 baru)
- ❖ Pembangunan Embung 114



- ❖ Pembangunan rumah susun sebanyak 7.512 unit
- ❖ Pembangunan rumah khusus 3.230 unit
- Pembangunan kualitas rumah swadaya sebanyak 200 unit



Kementerian Perhubungan  
Rp41,5 Triliun



- ❖ pembangunan dan pengelolaan dermaga penyeberangan di 14 lokasi
- ❖ pembangunan dan pengelolaan kapal penyeberangan sebanyak 3 unit Roro



- ❖ pelayanan angkutan barang tol laut sebanyak 21 trayek
- ❖ pembangunan fasilitas pelabuhan di 9 lokasi



- ❖ pembangunan bandara baru di 4 lokasi



- ❖ pembangunan jalur kereta api sebanyak 144 km'sp (tahap awal/badan jalan)
- ❖ 271 km'sp (tahap penyelesaian)
- ❖ peningkatan jalur kereta api sebanyak 67 km'sp



Percepatan  
Pembangunan  
Infrastruktur Melalui  
Creative Financing  
"Kerjasama  
Pemerintah dengan  
Badan Usaha (KPBUs) "

# Bidang Pendidikan

Fokus dan arah kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru, serta memperkuat pendidikan vokasi



Rp35,9 Triliun

- Pemberian Program Indonesia Pintar kepada siswa menengah pertama sebanyak 4,4 juta siswa, kepada siswa sekolah dasar sebanyak 10,4 juta siswa, kepada siswa sekolah menengah atas sebanyak 1,4 juta siswa, dan kepada siswa menengah kejuruan sebanyak 1,8 juta siswa;
- Pembangunan/revitalisasi lembaga PAUD di daerah 3T sebanyak 400 lembaga
- Pemberian bantuan pembangunan ruang kelas baru kepada lembaga PAUD sebanyak 100 Lembaga
- Peningkatan kompetensi guru kelas di bidang tematik sebanyak 150.539 orang.



Rp62,0 Triliun

- Pemberian bantuan PIP kepada siswa MI sebanyak 853,4 ribu siswa dan kepada siswa MTS sebanyak 835,3 ribu siswa
- Pemberian bantuan KIP sebanyak 7.951 siswa dan pemberian bantuan BOS sebanyak 10.654 siswa
- Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu (miskin) sebanyak 3.085 siswa
- Pemberian beasiswa Bidik Misi sebanyak 1.621 siswa
- Pemberian bantuan tunjangan NonPNs kepada penyuluh agama sebanyak 5.500 orang



Rp41,2 Triliun

- Melakukan riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat dengan Jumlah penelitian sebanyak 14.803 laporan
- Pemberian beasiswa bidik misi bagi 430.961 mahasiswa.
- Revitalisasi sarana dan Pasarana PTN sebanyak 16 PT



# Belanja Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan program promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), peningkatan nutrisi balita, ibu hamil dan menyusui, percepatan penanganan stunting serta penguatan sinergi antar program perlindungan sosial.



## Kementerian Kesehatan

Rp58, 7 Triliun

## Kementerian Sosial

Rp58, 9 Triliun



### Program Prioritas

- Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

### Output

- Tersedianya makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) kepada 525.420 ibu hamil.
- Terlaksananya rumah sakit dan puskesmas yang diakreditasi sebanyak 47 rumah sakit dan 5.600 puskesmas.
- Tersedianya sarana prasarana pengendalian HIV-AIDS untuk 10.000.000 tes HIV.
- Penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa.

### Program Prioritas

- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penanganan Fakir Miskin
- Pemberdayaan Sosial
- Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial.

### Output

- Menyalurkan bantuan sosial keluarga miskin (PKH) sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
- Menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM.
- Terlaksananya sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) sebanyak 150 kab/kota, dan Puskessos sebanyak 300 desa/kelurahan.
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sebanyak 65.911 orang pendamping PKH.



# Bidang Ketahanan Pangan dan Energi

Meningkatkan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan, penguatan cadangan dan stabilisasi harga pangan, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi



## Kementerian Pertanian

Rp21, 7 Triliun

## Kementerian Kelautan Perikanan

Rp5, 5 Triliun

## Kementerian ESDM

Rp 5 Triliun

### Program Prioritas

- Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
- Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

### Output

- Memprioritaskan fasilitas penerapan budidaya padi sebanyak 1.229.120 Ha;
- Tersedianya kawasan Aneka Cabai seluas 10.000 Ha.
- Tersedianya bibit ternak unggul sebanyak 580.181 ekor.
- Tersedianya jaringan irigasi tersier 134.075 ha

### Program Prioritas

- Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- Pengelolaan Ruang

### Output

- Kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan sebanyak 300 unit kapal perikanan < 5 GT;
- Tersedianya bantuan sarpras sebanyak 20 paket excavator;
- Pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan sebanyak 300 unit;
- Tersedianya lahan garam yang difasilitasi sebanyak 1.000 ha.

### Program Prioritas

- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
- Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

### Output

- Tersedianya infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 76.800 SR
- Pengendalian pembangunan pembangkit listrik sebanyak 1 rekomendasi
- Terlaksananya pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air sebanyak 10 unit.



# Bidang Pertahanan & Keamanan

Melanjutkan Pembangunan Postur Pertahanan Militer, Penguatan Almatsus, dan Mensukseskan Pemilu



Rp107,1 Triliun

- Pengadaan /penggantian kendaraan tempur matra darat sebanyak 3 unit
- Pengadaan/penggantian senjata dan munisi matra darat sebanyak 688 pucuk
- Peningkatan/pengadaan fasilitas dan Sarpras Matra laut dengan output dermaga KRI, Sarpras sebanyak 1 giat
- Peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, KAL, dam Ranpur/Rantis Matra Laut 18 unit
- Peningkatan/penerimaan radar PSU dan alat komplek lainnya dengan output modernisasi Command Center Kohanudnas sebanyak 1 paket



Rp76,2 Triliun

- Pengembangan peralatan Polri dengan output pemenuhan Almatsus sebanyak 2 paket
- Pengendalian operasi kepolisian dengan output pengamanan Pemilu 2019 di 33 Polda
- Penindakan tindak pidana terorisme dengan output penyelesaian kasus tindak pidana terorisme sebanyak 10 kasus



Rp18,1 Triliun

- Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarpras pemilu dengan output sarpras keperluan Pemilu sebanyak 4.392 unit
- Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih dengan output rekapitulasi dan penghitungan suara sebanyak 549 Satker

# **KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA**

Program Pengelolaan Utang

Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri  
Rp255,46 Triliun



Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri  
Rp19,96 Triliun



Program Pengelolaan Utang  
Rp275,42 Triliun



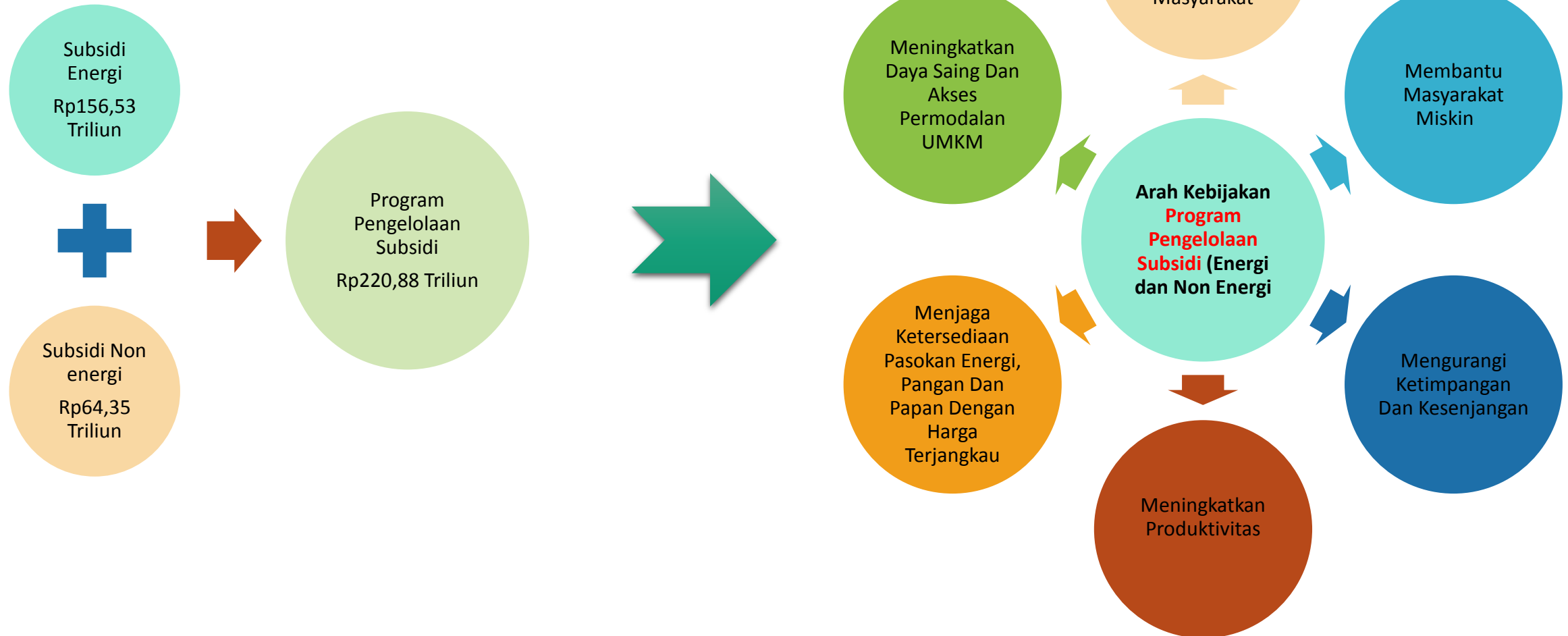
Arah Kebijakan

Memenuhi Kewajiban Pemerintah untuk Menjaga Akuntabilitas Pengelolaan Utang

Meningkatkan Efisiensi Bunga Utang Pada Tingkat Resiko yang Terkendali Melalui Pemilihan Komposisi Utang yang Optimal dan Pemanfaatan Instrumen Lindung Nilai



# Program Pengelolaan Subsidi



## Subsidi Energi Sebesar Rp156,53 T

### Asumsi:

1. Kurs Rp14.000/US\$
2. ICP US\$ 70/barel
3. Volume BBM 15.110 ribu KL
4. Subsidi solar Rp2.000/liter
5. Volume LPG 6.978 juta Kg

### Subsidi BBM & LPG

Rp100,07 T

Dengan arah kebijakan:

Melanjutkan subsidi tetap solar

Melanjutkan subsidi selisih harga mitan dan LPG

Mengupayakan penyaluran subsidi LPG lebih tetap sasaran

Meningkatkan peran Pemda dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan LPG

### Subsidi Listrik

Rp56,46 T

Dengan arah kebijakan:

Pemberian subsidi seluruh pelanggan RT daya 450 VA

Pemberian subsidi RT Miskin & Tidak Mampu daya 900 VA (mengacu BDT)

Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah

Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara

Menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik

Mengembangkan EBT yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan dan daerah terpencil

### Asumsi:

1. Kurs Rp14.000/US\$
2. ICP US\$ 70/barel
3. Menjangkau lebih banyak pelanggan RT daya 450 VA & 900 VA yang membutuhkan

## Subsidi Non Energi Sebesar Rp64,35 T

### Arah Kebijakan Subsidi Pupuk:

1. Perbaikan proses penetapan data penerima manfaat yang diselaraskan dengan NIK dan penerapan RDKK secara elektronik (e-RDKK)
2. Penyempurnaan mekanisme penyaluran melalui pemakaian kartu tani

Subsidi Pupuk  
Rp29,50 T

Subsidi PSO  
Rp6,76 T

### Arah Kebijakan Subsidi PSO:

1. Pemberian subsidi LRT Jabodetabek
2. Melanjutkan penugasan layanan jasa angkutan kereta api, angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi, dan layanan informasi publik terutama di daerah terpencil, tertinggal dan rawan konflik.

### Arah Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program:

1. Menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan
2. Mendukung diversifikasi energi
3. Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum

Subsidi Bunga Kredit Program  
Rp16,65 T

Subsidi Pajak  
Rp11,43 T

### Arah Kebijakan Subsidi Pajak:

1. Memberikan insentif atas pengembangan sektor panas bumi
2. Menarik minat investor asing atas obligasi Pemerintah
3. Memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum dan melindungi kepentingan umum
4. Meningkatkan daya saing industri tertentu dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara.

# Upaya Pemerintah Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Subsidi

Melanjutkan perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani

Melanjutkan kebijakan KUR yang terintegrasi dengan data program Pemerintah dan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap instrumen penyaluran KUR

Mengalihkan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai tahun 2018

Meniadakan subsidi benih dan digabungkan dengan program sejenis pada K/L menjadi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) mulai tahun 2018.

Program Pengelolaan Hibah

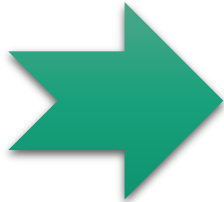
Hibah Kepada Pemda  
Rp1.940,2 Miliar



Banking Commissions  
Rp0,4 miliar



Program Pengelolaan Hibah  
Rp1.940,6 Miliar



**Arah Kebijakan**

Mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pada bidang transportasi, pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi serta kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja

“Untuk Mendanai pembangunan infrastruktur (transportasi, pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi dll)”



1. Hibah kepada pemda Rp1.940,2 miliar, yang bersumber :

2. Pengelolaan hibah lainnya berupa *Banking Commissions*, yang merupakan persyaratan yang harus dibayar Pemerintah terkait dengan penerimaan hibah dari Jepang Rp0,4 miliar



Pinjaman luar negeri Rp396,1 miliar

- *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* sebesar Rp276,9 miliar, bersumber dari World Bank, ADB, dan IFAD yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan/petani di seluruh Indonesia serta meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi.
- *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)* sebesar Rp119,0 miliar, bersumber dari ADB bertujuan mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memitigasi risiko banjir dengan lebih baik.
- *Mass Rapid Transit (MRT)* Rp0,1 miliar, sebagai persiapan untuk kelanjutan program hibah yang bersumber dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* bertujuan untuk membangun sistem transportasi kota yang efisien.
- *Rural Empowerment and Agricultural Development—Scaling Up Initiative (READ-SI)* sebesar Rp0,1 miliar.

Hibah luar negeri sebesar Rp44,1 miliar

- Hibah air minum Rp0,1 miliar, dari Pemerintah Australia.
- Hibah air limbah sebesar Rp0,1 miliar dari Pemerintah Australia.
- Hibah Australia-Indonesia pembangunan sanitasi Rp0,1 miliar.
- Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)* Rp0,1 miliar.
- Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* Rp19,7 miliar.
- Hibah instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang sebesar Rp24,0 miliar.

Penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.500 miliar

- *Nationwide Water Hibah Program (NWHP)* sebesar Rp900,0 miliar
- Hibah sanitasi sebesar Rp100,0 miliar.
- Hibah jalan daerah Rp500,0 miliar, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan.

## Program Pengelolaan Belanja Lainnya

**Rp154,90 Triliun**

D  
I  
G  
U  
N  
A  
K  
A  
N  
  
U  
N  
T  
U  
K

Antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal

Penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (ba) sendiri

Mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (cbp) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan

Penyediaan dana cadangan belanja pegawai, bencana alam, keperluan mendesak, dan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian

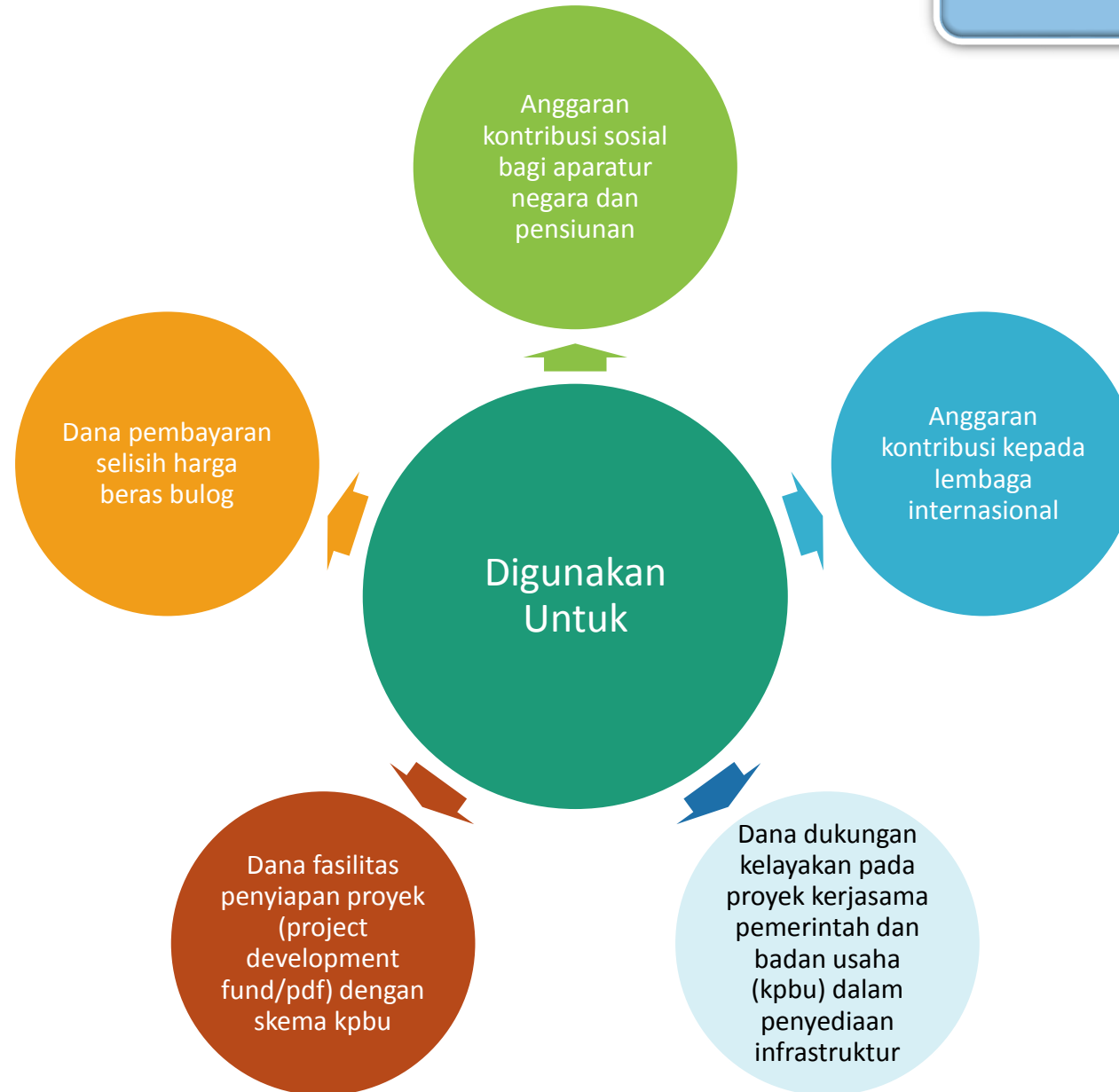
Mendukung keanggotaan indonesia dalam dewan keamanan pbb

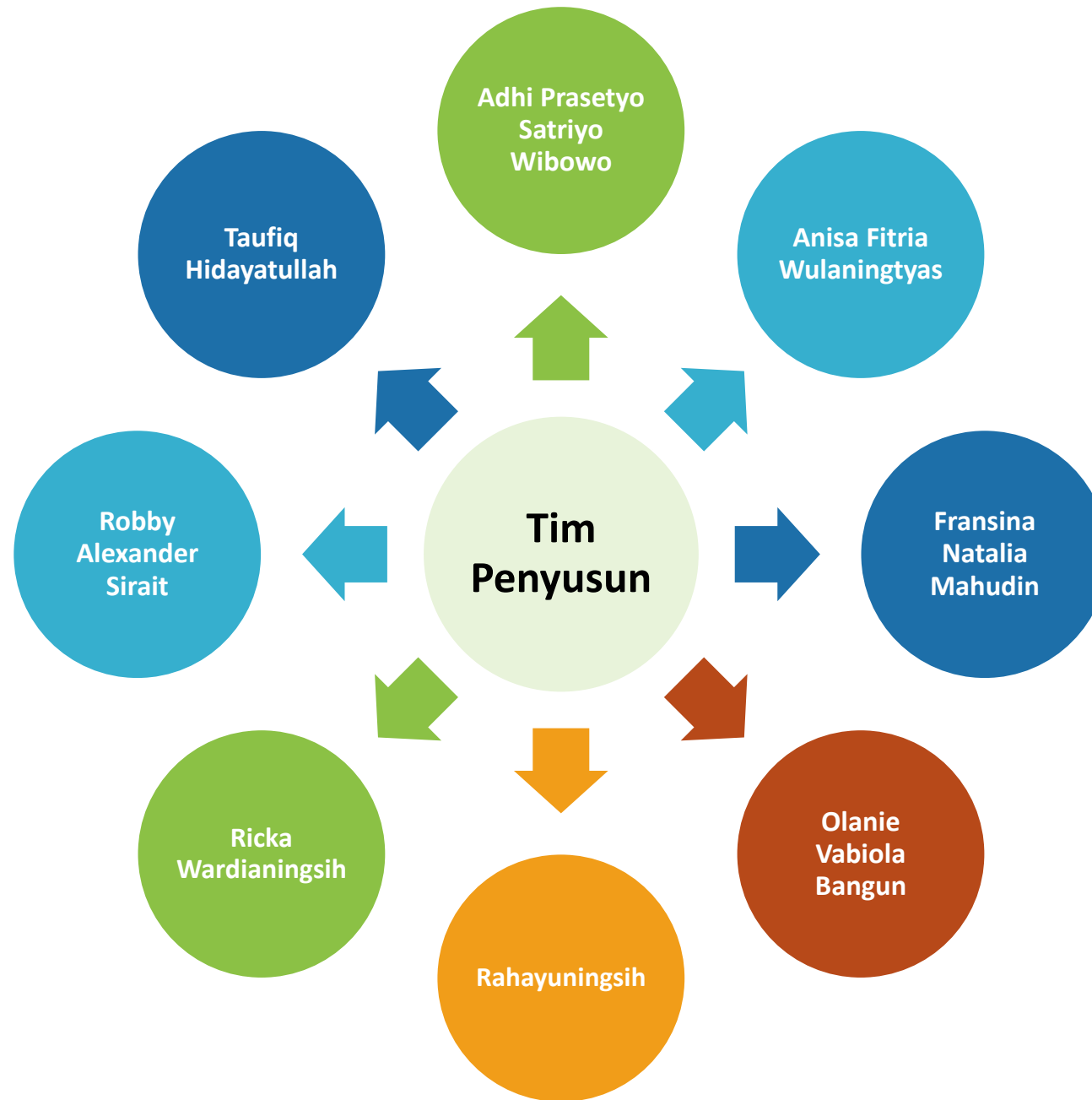
(a.L)



# Program Pengelolaan Transaksi Khusus

**Rp113,91 Triliun**







**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 5715635/5715528 - FAX (021) 5715528  
HTTP ://WWW.PUSKAJLANGGARAN.DPR.GO.ID  
EMAIL : PUSKAJLANGGARAN@DPR.GO.ID